

**IMPLEMENTASI PROGRAM KB DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Juan George Lensini

NPP. 30.1140

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: juanlensini31@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The background of this research is that there the weakness of family planning program services to the community so that people's understanding is lacking and services do not reach all areas. a way out of the problem of population growth so that optimal services are needed to suppress the rate of population growth. Purpose:* *The purpose of the research was to find out and analyze the implementation of the family planning program and the inhibiting factors as well as the efforts made by the Population Control and Family Planning Service in overcoming obstacles that occur in family planning program services in Kupang City so as to improve family welfare. Method:* *The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Results:* *Based on the results of the research conducted, the implementation of the Family Planning Program by the Population Control and Family Planning Office of the City of Kupang is quite good, but not optimal. Conclusion:* *Several obstacles such as very binding customs, lack of field officers and lack of budget. Researchers recommend good coordination with regional leaders so that adequate budgets can be provided and the addition of field officers to improve service for the better.*

Keywords: *Implementation; Family Planning Program*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan pelayanan program KB kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat menjadi kurang dan adanya pelayanan yang tidak menjangkau semua wilayah, hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan KB kepada masyarakat mengingat bahwa pelayanan program KB adalah jalan keluar dari permasalahan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan pelayan yang optimal dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. **Tujuan:** Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program KB dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelayanan program KB di Kota Kupang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Implementasi Program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang sudah cukup baik, namun belum optimal. **Kesimpulan:** Beberapa hambatan seperti adat istiadat yang sangat mengikat, kurangnya petugas lapangan dan kurangnya anggaran. Peneliti merekomendasi adanya koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah sehingga dapat diberikan anggaran yang memadai dan adanya penambahan personil petugas lapangan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi; Program KB

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu Negara. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan sistem pembangunan yang efektif serta sesuai dengan karakteristik suatu negara. Jumlah penduduk merupakan variabel terpenting dalam suatu Negara guna membangun Negara yang maju dan berhasil. Namun pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan banyak permasalahan seperti kemiskinan, kriminalitas, rendahnya kualitas pendidikan, dan pertumbuhan penduduk yang tidak merata.

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam kategori 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terencil dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyumbang jumlah penduduk terbesar di Provinsi NTT adalah Kota Kupang dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sejumlah 452 ribu jiwa atau 8,40 persen penduduk NTT ada di Kota Kupang. Angka kelahiran yang tinggi menjadi akibat terus bertambah jumlah penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun. Ini menjadi suatu tantangan bagi Provinsi NTT terkhusus Kota Kupang, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik mengakibatkan Kota Kupang masih jauh dari kata berhasil dalam hal pembangunan. Untuk itu dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera dan mengatasi permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia saat ini maka salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah program Keluarga Berencana (KB). Maka dibentuklah sebuah badan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pelayanan program KB oleh BKKBN perlu diterapkan ke seluruh wilayah di provinsi NTT, oleh sebab itu dibentuknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di setiap kota dan kabupaten di wilayah NTT sebagai penyokong dalam penyaluran alat kontrasepsi agar merata keseluruh wilayah. Namun kinerja DPPKB Kota Kupang masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program KB yang masih belum menyeluruh ke semua wilayah Kota Kupang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, sehingga masyarakat paham akan penggunaan dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pelayanan KB belum optimal diantaranya: Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tidak sebanding dengan luas wilayah dengan ratio 1:6 sedangkan nasional adalah 1:4, budaya lama seperti banyak anak

banyak rezeki, tidak lengkap kalau belum mempunyai anak perempuan dan laki-laki. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan program KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kota Kupang dan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum tercapainya sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Masyarakat belum menyadari salah satu faktor terciptanya keluarga sejahtera adalah dengan mengikuti program KB, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam program KB.
- 2) Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) belum sebanding dengan luas wilayah dengan rasio 1:6, tenaga penyuluh KB yang memenuhi standar hanya 75% mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang KB masih sangat kurang.
- 3) Latar belakang pendidikan yang rendah sehingga masyarakat kekurangan pengetahuan tentang KB dan masih menerapkan Budaya-budaya lama seperti banyak anak banyak rejeki dan pemahaman yang salah bahwa dalam keluarga yang lengkap harus memiliki anak laki-laki dan perempuan.
- 4) Fasilitas pelayanan KB yang kurang memadai menyebabkan masyarakat sulit mengakses pelayanan KB karena keterbatasan akses baik jarak, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan KB.
- 5) Efek samping yang diberikan ketika menjadi Akseptor KB seperti kenaikan berat badan, perubahan siklus menstruasi, tidak seketika subur ketika melepas KB, dan gangguan kesehatan lain seperti nyeri dan sakit kepala. Hal ini memperlemah kemauan masyarakat untuk mengikuti program KB.
- 6) Kurangnya partisipasi pria yang menjadi Akseptor KB, hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat selama ini bahwa program KB diperuntukkan untuk wanita, sehingga pria cenderung pasif.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pelayanan program keluarga berencana DPPKB dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Penelitian M.Khoirur Roziq berjudul Efektifitas Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Rumah Tangga (Studi Kampung Kencana Biru Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi), menemukan bahwa pada awal pembentukan Program KB tahun 2016 memang kurang adanya antusiasme dari masyarakat namun setelah banyaknya manfaat yang dirasakan, masyarakat mulai sadar tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga demi mewujudkan keluarga bahagia, aman dan sejahtera (M.Khoirur Roziq, 2020). Penelitian Khalizah Mayasari BR Damanik menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga berencana dan pertumbuhan jumlah penduduk secara parsial memberi dampak positif yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kota Medan (Khalizah Mayasari BR Damanik, 2020). Penelitian

Saipudin memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana dari segi komunikasi yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sudah baik dengan melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat di setiap dusun yang ada di Desa Telaga Waru dan variabel Sumber daya pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah mendanai sebagai penunjang program KB (Saparudin, 2021).

1.3. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah mengenai kinerja pelayanan KB dalam meningkatkan pelayanan dan menciptakan inovasi pelayanan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai faktor penghambat terhadap implementasi sistem tersebut. Metode yang digunakan peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif juga berbeda dengan penelitian Khalizah. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni teori Implementasi menurut Edward III dalam Tachjan (2006:56), dengan 4 (empat) dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1.4. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program KB dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelayanan program KB di Kota Kupang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

II. METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi pelayanan publik dalam hal pelayanan program KB dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang menekankan pada peran manusia dalam organisasi, kelompok maupun individu. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 (sebelas) orang informan. Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data terhadap angka- angka yang terdapat dalam data sekunder yang didukung dengan penjelasan melalui wawancara bersama informan yang akan disajikan sebagai data primer. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Implementasi program KB dalam hal pemberdayaan keluarga dalam pengendalian penduduk untuk tercapainya keluarga sejahtera oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang dengan menggunakan Teori Implementasi menurut Edward III (2006).

Adapun hasil dapat dilihat pada subbab berikut

3.1 Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang telah konsisten dalam hal pemberian sosialisasi terbukti dari hasil capaian meskipun belum mencapai 50 persen dari total pasangan usia subur pada tahun 2022 namun partisipasi peserta aktif KB sudah cukup baik. Pelayanan program KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana telah melakukan upaya-upaya yang kompleks dimana pada bidang KB sendiri dalam melakukan Pelayanan program telah terus memantau perkembangan di lapangan dengan cara mengunjungi setiap pustu, puskesmas dan rumah sakit yang melayani masyarakat pada saat penggunaan alat kontrasepsi berupa pemasangan implant, IUD, vasektomi dan tubektomi serta suntik dan spiral serta melakukan penyaluran kondom serta pil kepada pustu, puskesmas serta rumah sakit. Hal ini harus terus dijaga agar tiap tahunnya dapat terus meningkat.

3.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya pada dinas memang masih sangat minim dilihat dari jumlah petugas lapangan keluarga berencana atau PKB yang hanya berjumlah 18 orang dan harus menangani 6 kecamatan dimana terdapat 51 kelurahan. Hal ini memang cukup sulit sehingga PKB yang ada memiliki tanggung jawab yang besar bukan hanya sekedar penyuluhan namun juga dalam hal pendataan dan pemantauan perkembangan dari pasangan aktif KB. Untuk sumber daya finansial juga masih kurang yaitu banyak kegiatan yang masih belum dapat dioptimalkan karena keterbatasan anggaran. Sementara dari segi sarana dan prasarana memang sudah memadai namun kembali lagi SDM yang menjajalankannya masih terbatas.

3.3 Disposisi

Disposisi/Sikap Pelaksana para implementor sudah berikap baik dengan mendukung penuh pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tanggung jawab dari para PKB untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Kupang. Namun dalam hal pemberian insentif tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran oleh sebab itu dinas rutin mengadakan kegiatan untuk mempererat hubungan kekeluargaan lewat *family gathering* tiap tahunnya. Padahal dengan adanya insentif yang cukup layak diberikan kepada *implementor* menjadi bentuk penghargaan juga terhadap apa yang telah dilakukan dan juga mendorong *implementor* melaksanakan perintah dengan baik.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang memiliki rentan kendali yang kompleks dan dimana Kepala Dinas selaku pemegang kendali cukup responsif dalam hal menanggapi keluhan bawahannya terkait dengan pelaksanaan program KB. Sementara untuk *Standard Operational Prosedur* (SOP) telah sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang serta mudah dipahami oleh masyarakat sehingga hal ini menambah antusiasme masyarakat dalam mengikuti KB.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelayanan program KB oleh BKKBN perlu diterapkan ke seluruh wilayah di provinsi NTT, oleh sebab itu dibentuknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di setiap kota dan kabupaten di wilayah NTT sebagai penyokong dalam penyaluran alat kontrasepsi agar merata keseluruhan wilayah. Namun kinerja DPPKB Kota Kupang masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program KB yang masih belum menyeluruh ke semua wilayah Kota Kupang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, sehingga masyarakat paham akan penggunaan dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pelayanan KB belum optimal diantaranya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tidak sebanding dengan luas wilayah dengan ratio 1:6 sedangkan nasional adalah 1:4, budaya lama seperti banyak anak banyak rezeki, tidak lengkap kalau belum mempunyai anak perempuan dan laki-laki, fasilitas pelayanan KB yang kurang memadai menyebabkan masyarakat sulit mengakses pelayanan KB, selain itu efek samping yang diberikan ketika menjadi Akseptor KB seperti kenaikan berat badan, perubahan siklus menstruasi, tidak seketika subur ketika melepas KB, dan gangguan kesehatan lain seperti nyeri dan sakit kepala. Hal ini memperlemah kemauan masyarakat untuk mengikuti program KB serta kurangnya partisipasi pria yang menjadi Akseptor KB, hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat selama ini yang bahwa program KB diperuntukkan untuk wanita, sehingga pria cenderung pasif.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor-faktor penghambat implementasi program KB dalam hal pemberdayaan keluarga dalam pengendalian penduduk untuk tercapainya keluarga sejahtera oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, tiap unsur implementasi program keluarga berencana telah diupayakan dengan baik namun unsur Sumber Daya dan Disposisi masih mengalami kegagalan ditandai dengan banyak kegiatan yang masih belum dapat dioptimalkan karena keterbatasan anggaran. Sedangkan unsur Komunikasi dan Struktur Birokrasi dapat dibilang terlaksana dengan baik dan memadai.
2. Faktor penghambat terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain kurangnya jumlah personil PKB yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang mengakibatkan para PKB kewalahan dalam melakukan penyuluhan, adat istiadat yang masih kental serta budaya-budaya lama yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rejeki serta budaya patrilineal dimana anak laki-laki harus ada dalam keluarga untuk meneruskan nama keluarga serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memahami belum pentingnya program KB sehingga merasa takut karena hanya melihat KB dari efek samping kurangnya pendanaan yang mengakibatkan inovasi-inovasi dari dinas belum dapat dioptimalkan.
3. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang dalam menghadapi hambatan yang ditemui antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam pemberian informasi dan edukasi untuk mempersiapkan mereka sebagai calon pasangan usia subur nantinya, memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang lebih mudah dan minim anggaran serta menentukan skala prioritas guna mengatasi keterbatasan personil PKB yang ada di masing-masing kelurahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang sebagai pendekatan deskriptif yang dipilih berdasarkan pendapat Bogdan dalam Sugiyono (2013:244).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penghambat implementasi program KB dalam hal pemberdayaan keluarga dalam pengendalian penduduk untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Tuhan Yesus dan keluarga khususnya orang tua saya yang selalu ada dan mendukung dalam setiap hal. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, masyarakat yang ada di lapangan saat penelitian dan telah bersedia menjadi informan serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2015. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Cetakan ke 5. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Damanik, Khalizah Mayasari Br., 2020. *Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Berencana dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Roziq, M. Khoirur., 2020. *Efektifitas Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Rumah Tangga (Studi Kampung Kencana Biru Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Saipudin. 2021. *Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) Di Desa Telaga Waru Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang.